



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 956/IV/IV/2017 • APRIL 2017



PEMERINTAH DIHARAP MENGAYOMI DAN MEMFASILITASI DIFABEL

4 Novanto ajak KSPSI
Majukan Perekonomian
Nasional

10 Indonesia Komitmen
Dalam Pembangunan
MDGs dan SDGs

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Pemerintah Diharap Mengayomi dan Memfasilitasi Difabel

Pemukulan gong dan pemotongan pita bunga oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Wakil Ketua bidang Korinbang Agus Hermanto sebagai tanda pembukaan acara Disabilitas Expo 2017. Acara ini sebagai peringatan satu tahun Undang-Undang Penyandang Disabilitas dengan tajuk 'Berkarya untuk Bangsa'. Fadli berharap kepada Pemerintah agar mengayomi dan memberikan fasilitas kepada kaum difabel, sehingga ke depan bisa hidup lebih mandiri.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon dan Agus Hermanto beserta Sekjen DPR RI Achmad Djuned membuka Disabilitas Expo 2017

“Semua yang diamanatkan undang-undang dapat dilaksanakan, mengayomi memberikan fasilitas kepada kaum disabilitas untuk dapat lebih mandiri ke depan. Dan juga harus diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat kita,” papar Fadli di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/04).

Dia menyampaikan kaum difabel merupakan bagian tak terpisahkan dari rakyat Indonesia, yang harus mendapatkan dukungan fasilitas. Fadli juga mengharapkan para difabel bisa lebih mandiri, dengan dukungan fasilitas publik yang berpihak pada mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017

tentang Penyandang Disabilitas, para difabel berhak mendapat fasilitas untuk mempermudah kegiatannya di tempat umum. "Termasuk hal-hal yang bersifat teknis, akses seperti tangga," ujar Fadli.

Kegiatan ini, kata Fadli, dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang tersebut, juga sebagai dorongan pada pelaksanaan amanat Undang-undang. Sehingga para penyandang disabilitas bisa lebih jauh mengekspresikan dirinya dari berbagai latar belakang profesi.

"Dari disabilitas expo ini kita bisa menunjukkan, bahwa rekan-rekan para penyandang disabilitas bisa berkreasi sama dengan yang lain. DPR RI ini adalah

rumah rakyat, bisa dipakai kegiatan semua pihak termasuk para difabel," ungkap Fadli.

Fadli berharap kegiatan ini menjadi satu langkah, dan setiap tahun bisa diselenggarakan, sebagai wujud dan komitmen DPR RI mendukung disabilitas, difabel merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.

"Dengan disabilitas expo, DPR RI sangat mendukung kegiatan ini, sekaligus mempromosikan karya-karya mereka. Banyak karya dari difabel kualitasnya bagus, dan perlu mendapat kesempatan untuk berpameran dan diperkenalkan kepada publik," ungkap Fadli. ■

(eko/sc)/foto:anief/hr.



Ketua DPR RI Apresiasi Program Operasi Katarak Gratis

Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi program operasi katarak gratis untuk seribu pasien yang diselenggarakan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) di Rumah Sakit Unipdu Medika, Pondok Pesantren Darul Ulum, Jawa Timur.



Ketua DPR RI Setya Novanto meninjau program operasi katarak gratis untuk seribu pasien oleh LKK NU di Jawa Timur.

“ Ada sekitar 240.000 saudara-saudara kita menderita katarak yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Mereka memerlukan uluran tangan kita semua agar bisa keluar dari ancaman kebutaan,” kata Setnov dalam rilisnya, Senin (17/04).

Keterbatasan informasi dan pendanaan, kata Setnov, yang menyebabkan mereka tidak bisa mengobati penyakit yang dialaminya. Karena itu, sebagai bagian dari keluarga besar NU, ia mendukung penuh program mulia LKK NU yang bekerjasama dengan New Vission Singapore, BRI Peduli, Kompas TV, dan Kodam Brawijaya untuk memberikan bantuan kepada seribu orang saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk melakukan operasi katarak secara gratis.

"Saya harap kegiatan kemanusiaan semacam ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh LKK NU, hingga daya jangkau ke pelosok desa di Jawa Timur, bahkan ke berbagai daerah di Indonesia," ungkap politisi partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan dirinya meyakini kegiatan mulia itu jika terus dilaksanakan akan banyak lembaga, perusahaan swasta maupun BUMN yang dapat diajak bekerjasama untuk mengadakan kegiatan sosial seperti ini.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Jombang Nyono Suharli Windoko, Pimpinan RS Unipdu Medika sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Zulfikar As'ad dan Zahrul Azhar, Anggota DPR RI Gatot Soedjito dan Robert Kardinal. ■

(rmm/scy) foto: ika/ka/hr.

- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**
Bagus Mudjiharjanto
- ANGGOTA REDAKSI**
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**
Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah
- ADMINISTRASI FOTO**
Hasri Mentari
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN
Pimpinan Penerbitan
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

Penanggung Jawab Produksi
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

Staf Produksi
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

Distribusi dan Sirkulasi
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

Koordinator
Mujiono

Staf Distribusi dan Sirkulasi
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Novanto Ajak KSPSI Majukan Perekonomian Nasional



Ketua DPR RI Setya Novanto dalam acara Jalan Sehat, peringatan HUT KSPSI yang ke-44 di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Semarang



Pekerja adalah pilar utama dalam kemajuan industri. Di negara manapun, tidak ada kemajuan ekonomi tanpa dukungan dari pekerja.

“ Saya selaku Ketua DPR RI, membuka pintu selebar-lebarnya bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Mari bersama kita ciptakan perekonomian nasional yang semakin maju, dengan pekerja yang semakin sejahtera,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto dalam acara Jalan Sehat, peringatan Hari Ulang Tahun Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang ke-44 Sabtu (15/04) di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Semarang.

Menurut Novanto, sapaan akrabnya, keberadaan KSPSI diharapkan semakin kokoh sebagai organisasi perjuangan bagi pekerja. Terutama dalam memberikan perlindungan, memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pekerja.

“Kita patut bersyukur, ditengah kondisi perekonomian dunia yang tak menentu, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5 persen. Salah satu sebabnya, karena stabilitas politik yang terjaga berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah dan DPR RI,” ungkap politisi F-Golkar itu.

Terakhir, Novanto meminta KSPSI juga bisa menjadi jembatan dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan pekerja.

Lebih kurang 4.000 peserta mengikuti acara ini, baik dari kalangan pekerja anggota KSPSI maupun masyarakat umum. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, Ketua Umum DPP KSPSI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad, Anggota FPG DPR RI Robert Kardinal. ■

@k.mpg/fotojaka/hr

Fahri Hamzah Terima Dubes Kuwait



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah terima Dubes Kuwait Abdul Wahab Abdullah Al-Sagar

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Abdul Wahab Abdullah Al-Sagar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/04). Dalam kunjungan tersebut, Dubes Kuwait menyampaikan keinginannya untuk membentuk Gabungan Kerja Sama Antar Parlemen (GKSAP) Indonesia - Kuwait.

Hal itu kemudian disambut baik oleh Fahri, ia menilai Kuwait adalah salah satu negara teluk yang cukup strategis untuk meningkatkan hubungan kerja sama di kawasan Timur Tengah. Terlebih lagi, kedua negara adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

"Kuwait ini negara dengan sistem ke-emirate-an tetapi tradisi dan demokrasi parlemennya relatif hidup," ungkap Fahri.

Di sisi lain, ia melanjutkan hubungan antara Indonesia dan Kuwait sudah berlangsung sejak lama sehingga diperlukan sebuah wadah untuk memperkuat kerja sama antar parlemen melalui pembentukan "friendship group" atau GKSAP.

"Kita ingin kedatangan mereka ke sini (Parlemen) membuat mereka senang, *feel at home*. Juga kalau ada yang kurang lancar nanti bisa kita bantu untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Kebetulan dalam waktu dekat, akan ada pertemuan Kementerian Luar Negeri kedua negara untuk membahas seluruh MoU dan kerja sama yang pernah dibuat dan apa yang perlu dilakukan ke depan," jelas Fahri. ■

(amv/sc)/Foto: Rumi/hr

Pimpinan DPR RI dan Anggota Komisi III DPR RI Kunjungi Al Khaththath di Mako Brimob



Pimpinan DPR RI dan Anggota Komisi III beserta Muhammad Al Khaththath

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik hukum dan keamanan (korpolkam), Fadli Zon menemui Muhammad Al Khaththath, terduga kasus makar yang ditahan Polda Metro Jaya di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jakarta, Selasa (18/04).

Fadli yang datang bersama empat anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, M, Syafei, Muslim Ayub, Abdul Wahab Dalimunthe mengungkapkan keprihatinannya atas penangkapan Al Khaththath. Kepada wartawan yang menunggunya di halaman Mako Brimob ia menceritakan kondisi Al Khaththath.

"Kami tadi berbicara langsung ditemani oleh penyidik dan komandan korps Gegana, karena ini bukan tahanan brimob, tapi tahanan Polda Metro Jaya. Kondisi Ustad Al Khaththath baik, ditahan di ruangan 3x2, ada toiletnya sendiri. Saat itu ia mengatakan selama 18-19 hari di tahan, baru diperiksa sekali saja. Pemeriksaannya itu terkait rencana aksi 313. Ia mengaku tidak

ada sedikitpun ada rencana makar. Ketika itu sudah berkomunikasi tentang rencana tersebut termasuk dengan Menkopolkam. Demonstrasi itu dilakukan di depan istana. Tidak ada sedikitpun rencana makar. Sehingga tuduhan-tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat," papar Fadli Zon.

Sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI, lanjut Fadli, supaya tidak terjadi *abuse of power*, menahan seseorang tanpa dasar yang jelas, termasuk aparat menahan seseorang tanpa alasan yang kuat. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka ia berharap

Kapolri dan Kapolda dapat segera melepaskan Al Khaththath kalau memang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Hal tersebut juga merupakan aspirasi yang diterima DPR RI dari berbagai pihak, diantaranya dari para ulama dan Komnasham.

Sebelumnya para ulama mendatangi gedung DPR RI meminta pembebasan Al Khaththath karena ketidakjelasan penahanan kepada rekannya tersebut. Begitu pun halnya dengan Komnasham yang mengatakan bahwa penahanan Al Khaththath tidak memiliki dasar, jangan sampai hal itu menyalahi HAM, apalagi hanya terkait pilkada.

"Tuduhan makar, baru rezim ini yang menggunakan pasal-pasal makar selama lebih dari 18 tahun memasuki era reformasi. Tidak boleh hukum menjadi alat politik. Digunakan untuk

kepentingan politik karena ketidaksukaan terhadap lawan politik. Kalau makar itu kan paling tidak terlihat, bersenjata dan mau menumbangkan. Tapi itu semua tidak ada. Apa yang dilakukan Al Khaththath sesuai dengan demokrasi, dijamin oleh konstitusi, justru penangkapan ini yang melanggar konstitusi," tegasnya.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan bahwa usai pilkada DKI Jakarta, pihaknya sudah mengagendakan untuk menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan jajarannya. Ia akan mempertanyakan dan meminta klarifikasi terkait penahanan ustad Al Khaththath tersebut. Ia ingin memastikan hukum dapat terus ditegakkan, tanpa adanya *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. ■

Ketahanan Budaya Jadi Semangat RUU Pemajuan Kebudayaan

Komisi X DPR RI bersama Pemerintah, menyetujui Rancangan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan untuk disahkan di Pembahasan Tingkat II atau Paripurna. Ketahanan budaya dan investasi terhadap budaya, menjadi semangat dalam pembahasan RUU ini. Jika ketahanan budaya kokoh, budaya akan terlindungi hingga berakhirnya peradaban.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Pemajuan Kebudayaan, Ferdiansyah, usai pembahasan Tingkat I di Gedung DPR RI, Senayana, Jakarta, Selasa (18/04). Dalam rapat yang berlangsung hingga dini hari itu, hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, serta perwakilan kementerian dan lembaga negara lainnya.

"Seperti kita ketahui, selama ini yang kita takutkan mengenai kebudayaan adalah infiltrasi budaya. Makanya dalam RUU disebutkan ketahanan budaya. Tentu jika kita memiliki ketahanan budaya yang kuat, tentu harapannya pada masa yang akan datang, bahkan hingga berakhirnya bangsa ini, ketahanan budaya kita akan kokoh," tegas Ferdi.

Selain itu, masih kata Ferdi, budaya jangan diartikan sebagai biaya, namun investasi. Pasaunya, dengan adanya aktivitas melestarikan, pemeliharaan dan berbagai aktivitas lainnya, hal itu merupakan upaya agar budaya menjadi daya tarik Bangsa Indonesia.

"Termasuk juga budaya jangan diartikan sangat sempit. Etos kerja pun juga menjadi bagian dari budaya. Jadi, hal apapun dalam pembangunan nasional itu beraspek dari budaya. Akhirnya kita menyimpulkan, budaya menjadi haluan pembangunan nasional," imbuh Ferdi.

Selain itu, dalam RUU ini juga diatur mengenai *reward* dan *punishment* kepada pelaku kebudayaan, masyarakat, hingga korporasi yang berkepentingan terhadap kebudayaan. *Reward* yang diatur dalam RUU, dan menjadi semangat dalam RUU ini adalah



Suasana Penandatanganan draf RUU Pemajuan Kebudayaan di Komisi X DPR RI

penghargaan bukan sebatas sertifikat semata. Namun adanya suatu penghargaan yang lebih bermakna dan mempunyai arti untuk penggiat dan pelaku kebudayaan.

"Misalnya kalau seseorang terbukti mengharumkan nama bangsa, memungkinkan ketika dia meninggal, dimakamkan di taman makam pahlawan (TMP) dan mendapat bintang penghargaan yang sesuai dengan prestasinya, sehingga bisa dikategorikan layak dimakamkan di TMP. Hal ini dalam konteks kontribusi dan berprestasi luar biasa terhadap budaya ini. Sehingga pemberian penghargaan ini tidak sembarangan diberikan," jelas Ferdi.

Sementara untuk *punishment* atau hukuman, Ferdi menjelaskan bahwa hal itu akan ditujukan kepada setiap orang atau lembaga yang merusak, menghalangi, bahkan menghancurkan objek pemajuan budaya. *Punishment*

itu bisa dikenakan sanksi, sesuai dengan sanksi yang ada.

"Misalnya, hukuman kurungan lima tahun dan denda Rp10 miliar. Jika yang melakukan adalah korporasi, maka akan *punishment* diberlakukan sebesar tiga kali lipat dibanding perorangan," jelas politisi F-PG itu.

Sementara untuk penganggaran dalam upaya pemajuan kebudayaan, Ferdi menjelaskan adanya diversifikasi pencarian sumber dana. Sehingga, anggaran tidak hanya melalui APBN, APBD atau dari masyarakat, tapi juga sumber dana lainnya.

"Kita minta pemerintah membentuk dana wali amanah. Apalagi sudah ada Perpres No 80 Tahun 2011 itu mengatakan bahwa memang diatur lebih lanjut mengenai dana wali amanah, dengan demikian sumber pendanaan yang selama ini secara konservatif atau normatif, ada dari dana wali amanah," jelas Ferdi.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu memastikan, RUU ini mengatur kebudayaan secara umum dan longgar, sehingga ketika RUU ini disahkan menjadi UU, tidak terlalu rigid dan rinci, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan budaya yang ada di masing-masing daerah. Ia pun berharap,

RUU ini dapat disahkan pada Paripurna 27 April 2017 mendatang.

Mewakili pihak Pemerintah, Mendikbud dan Menpar menyambut baik dengan disahkannya RUU ini di Tingkat I. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU ini untuk disahkan pada Tingkat II. Rapat diakhiri dengan penandatanganan draf RUU paling terbaru. ■



<https://grosinwayang.wordpress.com>



Bebas Visa Harus Menguntungkan Indonesia



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan bahwa kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia untuk dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dan lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa ke beberapa negara.

Demikian disampaikan saat RDP dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar Senin (17/04).

Hanafi Rais dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar bebas visa dapat diberikan kepada negara yang pendapatan per kapita yang tinggi agar ketika berinvestasi di Indonesia bisa dilakukan dengan jumlah besar. "Jadi yang diberikan bebas visa itu yang *income* per kapitanya tinggi. Jadi ketika investor tertarik dengan Indonesia, tanpa disuruh saja maka *spendingnya* juga tinggi," tutur Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi PAN itu juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa juga sebaiknya mempertimbangkan indeks pembangunan manusia di masing-masing negara. Sehingga ketika warga asing datang ke Indonesia tidak memberikan beban bagi Indonesia.

"Saya pikir juga yang punya indeks *human development* bagus. Jadi ketika warga asing datang kesini tidak membuat kejahatan transnasional, *cyber crime*, narkoba, ada yang buka jasa asusila. Sehingga kebijakan bebas visa tidak melimpahkan limbah sehingga Indonesia tidak mendapatkan *benefit* apa apa," tutur Hanafi.

Hanafi juga menuturkan bahwa pemerintah perlu untuk selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia, bukan justru menghambat pembangunan di Indonesia. "Saya kira perlu lebih selektif untuk negara mana saja terkait bebas visa ini," tutupnya. ■

(eko/sc) Foto : Eko/hr

Sekjen DPR RI Tekankan Pentingnya Masalah Budi Pekerti

Masalah budi pekerti itu sangat penting, dan program mengenai budi pekerti akan lebih ditingkatkan. Demikian disampaikan Sekjen DPR RI Achmad Djuned saat menerima Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (MGMP PPKn) SMA/MA Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/04).

“Terkait program budi pekerti, saat ini sudah menjadi perhatian dan pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Masalah budi pekerti menjadi keprihatinan bagi kita semua, dan itu sudah disadari oleh pemerintah, makanya ada kebijakan yang kita kenal dengan revolusi mental,” ucap Achmad Djuned.

Ia juga mengatakan, waktu pertemuan antara murid dengan guru di sekolah hanya beberapa jam, sementara selebihnya adalah ada dibawah tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Oleh karenanya sangat tidak adil kalau ada murid yang tersangkut permasalahan, lalu semuanya ditimpakan kepada pihak sekolah.

Selain memaparkan tentang peran dan fungsi Anggota Dewan, Achmad Djuned juga menjelaskan tentang sejarah, kedudukan dan komposisi DPR RI sebagai lembaga tinggi negara kepada para guru yang hadir. ■

(dep/sc)/forajayadi/hr



Sekjen DPR RI Achmad Djuned memberikan cinderamata kepada perwakilan MGMP PPKn SMA/MA Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Indonesia Komitmen Dalam Pembangunan MDGs dan SDGs

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nuhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Francisco Fontan Pardo pada Selasa, (18/04) untuk membahas beberapa hal terkait hubungan Uni Eropa dengan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

“ Saya sengaja mengundang beliau untuk datang kesini untuk bicarakan hal penting mengenai Uni Eropa dan ASEAN. Ini Dubes Uni Eropa untuk negara ASEAN yang berdomisili di Jakarta. Indonesia ini sebagai negara terbesar di ASEAN yang punya 60 persen kontribusi ekonomi di ASEAN. Sehingga kita perlu bincang dengan Dubes Uni Eropa untuk ASEAN,” ujar Nurhayati di Ruang Kerja BKSAP, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Politisi Demokrat ini juga membicarakan persoalan kelapa sawit yang kini menjadi perbincangan ramai di masyarakat pasca dikeluarkan resolusi kelapa sawit oleh Uni Eropa. “Yang dibicarakan selain peran Uni

Eropa dan ASEAN, juga mengenai isu terkini yang menggelisahkan masyarakat yakni perkebunan sawit atau resolusi Uni Eropa terhadap produksi kelapa sawit,” jelas Nurhayati.

Ia menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam pencapaian millenium development goals (MDGs) dan sustainable development goals (SDGs), Indonesia pun menurutnya telah menjadi negara terdepan dalam capaian pembangunan keberlanjutan.

“Saya yakin ini murni persaingan dagang dan politis. Kita tahu yang sedang berkembang adalah dari masyarakat yang ingin kelangsungan alam. Tapi Indonesia berperan dalam pencapaian millenium development goals dan sustainable

development goals. Indonesia berdiri paling depan dalam capaian pembangunan berkelanjutan,” ujar Nurhayati.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhayati mengundang Duta Besar Uni Eropa untuk hadir dalam acara World Parliamentary Forum of Sustainable yang akan berlangsung di Bali. Mendapatkan undangan tersebut, Francisco pun memberikan apresiasi dan menyambut baik atas peran Indonesia dalam capaian komitmen global.

“Kami menginformasikan akan ada konferensi pertama World Parliamentary Forum of Sustainable di Bali. Beliau menyambut baik. Beliau juga melihat Indonesia berperan aktif dalam capaian komitmen global,” tutupnya. ■

(ns/sc)/foto: iwan armanias/hr.



Ketua BKSAP DPR RI Nuhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Francisco Fontan Pardo

Komisi X DPR RI Setujui RUU Sisbuk

Komisi X DPR RI kembali menyetujui Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk), setelah sebelumnya mengalami penundaan pengesahaan di Tingkat II atau Paripurna pada Selasa (11/04) lalu.

Penundaan pengesahaan RUU ini karena masih adanya beberapa pasal yang harus di sinkronkan kembali di pembahasan tingkat komisi. Dengan disetujuinya RUU ini, maka akan kembali diambil keputusan untuk disahkan di tingkat Paripurna DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Sisbuk, Sutan Adil Hendra mengatakan, sebelumnya pada Selasa (4/4/2017) lalu, pihaknya sudah menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan kementerian lainnya, dan seluruhnya

menyetujui untuk dibawa ke Tingkat II. Termasuk dalam pandangan mini fraksinya, seluruh partai telah menyetujui.

"Akan tetapi pada 11 April pagi hari, sebelum paripurna, kita menerima surat dari Kementerian Agama. Pada saat itu meminta agar adanya konten atau isi buku yang berkaitan dengan buku keagamaan, menjadi tanggung jawab Menteri Agama," kata Sutan, usai raker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).

Untuk itu, masih kata Sutan, sesaat sebelum Paripurna dimulai, dilakukan lobi-lobi kepada seluruh fraksi. Lobi menyepakati masukan dari Kemenag diakomodir dengan penyesuaian di beberapa pasal. Sutan memaparkan, dalam Pasal 6 Ayat 3 RUU Sisbuk, disesuaikan bahwa buku yang bermuatan keagamaan, menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra bersama Mendikbud menandatangani draf RUU Sisbuk

pemerintahan di bidang agama.

"Hal ini telah menjadi keputusan bersama. Pandangan fraksi pun semuanya setuju. Tapi secara pengaturannya, akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karenanya, hari ini kita baru saja menandatangani draft RUU Sisbuk secara utuh, dan tidak ada pihak yang keberatan," kata politisi F-Gerindra itu.

Sutan berharap, agar RUU ini segera disahkan pada Tingkat II, dan Pemerintah segera menyusun PP untuk menjalankan UU ini. Sehingga, masyarakat mendapat makna yang sangat besar dari RUU ini, karena RUU ini adalah kemaslahatan umat.

"Dengan adanya UU ini masyarakat akan mendapatkan hadirnya negara dalam memperoleh buku yang bermutu, murah dan merata," harap politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, RUU ini sebagai langkah maju dari Pemerintah dan DPR RI, terutama untuk lebih merapikan buku nasional. Dengan semakin rapihnya sistem perbukuan tanah air, diharapkan ada andil atau saham dari perbukuan yang semakin signifikan dalam rangka memajukan bangsa, khususnya melalui program percepatan literasi nasional.

"Peraturan Pemerintah yang menyertai akan kita urai satu per satu. Bahkan tidak hanya ada PP, ada juga Peraturan Menteri, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait," komitmen Mendikbud.

Raker diakhiri dengan penandatangan draf RUU Sisbuk terbaru oleh seluruh perwakilan fraksi dan kementerian atau lembaga terkait. Hasil raker ini akan segera dilaporkan ke Bamus, dan diagendakan dalam paripurna. ■

Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan Dalam sebuah Demokrasi Modern

Dewasa ini kita dihadapkan pada situasi sosial dan politik yang cukup kompleks dan dinamis. Ditengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja wakil rakyat, lembaga perwakilan, baik DPR RI maupun DPRD, dihadapkan pada situasi dimana citra lembaga perwakilan tidak sepenuhnya dipandang baik oleh rakyat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Adies Kadir saat memberikan sambutan di acara seminar nasional bertajuk "Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan" di Hotel Crowne, Jakarta, Senin (17/04).

Adies mengatakan pandangan tersebut tentu saja tidak sepenuhnya benar. Namun persepsi publik itu dipahaminya sebagai bentuk kecintaan terhadap lembaga perwakilan. "Kecintaan itu bisa disampaikan dalam bentuk apresiasi, pujian, juga kritik. Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan vitamin yang membuat kita semakin aware dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD RI, dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU no. 42 tahun 2014," jelasnya.

Secara khusus, lanjut politisi Partai Golkar ini, kita patut berbangga atas kinerja DPR RI tahun 2014-2019 saat ini. "Dengan dinamika politik yang begitu kompleks, kita mampu menjalankan tugas dengan baik. DPR RI mampu mengimplementasikan tema besar DPR RI periode saat ini yakni Membangun Demokrasi yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen," imbuhnya.

Tema tersebut, menurutnya, telah teraktualisasi dalam tugas-tugas DPR RI hingga saat ini. Meski diakui bahwa dinamika sosial politik hukum dan ekonomi juga semakin berkembang dan menuntut keselarasan dengan kinerja lembaga perwakilan

Oleh karena itu, seminar nasional yang diadakan oleh MKD dengan tema Dinamika dan Tantangan kinerja lembaga perwakilan, adalah upaya dan ikhtiar MKD dalam merespons dan mengakomodasi persepsi

publik dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga perwakilan, ujarnya.

"Dengan kata lain kami ingin masyarakat melihat bahwa DPR RI atau legislatif betul-betul telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang ada. Terkait dengan adanya lembaga survey yang menempatkan DPR RI sebagai lembaga terkorup, itu harus dihilangkan. Namun Kami menyadari sepenuhnya, upaya tersebut tidaklah mudah. Meski mekanisme dan prosedur dijalankan dengan baik, namun dinamika sosial, politik dan ekonomi senantiasa memberi warna tersendiri tentang perjalanan tugas dan fungsi lembaga perwakilan secara umum. Pasalnya dari jumlah keseluruhan anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang hanya sebagian kecil yang tersangkut kasus korupsi, namun itu sudah menjadi berita besar atau menghebohkan. Sementara di eksekutif, berapa banyak gubernur, bupati atau walikota di seluruh Indonesia yang tersangkut korupsi, nyaris tidak terdengar suaranya," papar Adies.

Oleh karena itu, tegasnya, sebagai lembaga etik sesuai

Kecintaan itu bisa disampaikan dalam bentuk apresiasi, pujian, juga kritik. Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan vitamin yang membuat kita semakin aware dalam menjalankan tugas



Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Adies Kadir

dengan amanat pasal 119 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam rangka menjaga citra, wibawa serta keluhuran martabat DPR RI baik secara kelembagaan maupun personal. Tugas itulah yang membuat MKD berdiri di garis terdepan, tidak hanya dalam rangka mengawasi kinerja lembaga perwakilan, tetapi juga memproteksi berbagai persepsi dan citra tentang lembaga perwakilan.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang membuka seminar sekaligus menjadi salah satu keynote speaker dalam makalahnya yang berjudul Kinerja Berbasis Etika mengatakan bahwa DPR RI sebagai salah satu pilar utama demokrasi modern di Indonesia. Prinsip pemerintahan demokratis modern adalah lembaga-lembaga kekuasaan negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat, dipilih melalui pemilihan yang bebas, serta menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat, posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR RI berperan sebagai penyeimbang lembaga eksekutif melalui mekanisme check and balances, melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembentukan Undang-undang, representasi dan diplomasi.

"Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI itulah diperlukan reformasi kelembagaan. Reformasi itu meliputi penataan aspek kedewanan dan kesekretariatan yang akan difokuskan pada pengembangan, penguatan sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan tata laksana, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana, kemandirian anggaran, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan pembenahan birokrasi," terang Fahri.

"Oleh karena itu dalam melakukan reformasi DPR RI sebagai lembaga perwakilan posisinya harus semakin otonom," tegas Fahri.

Pada kesempatan itu juga hadir, Wakil Ketua MKD DPR RI, Syarifudin sadding, anggota MKD lainnya seperti Maman Imanul Haq, Guntur Sasono, serta beberapa pembicara yang merupakan pakar di bidangnya seperti Linca Marzuki, Siti Zuhro dan lain-lain. ■

(ayusci/fotoandri/hr

Ketua Komisi IX DPR RI Pertanyakan DAK Bidang Kesehatan

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy mempertanyakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS, Deputi Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan BAPPENAS, Direktur Dana Perimbangan dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

“Dulu itu ada kebijakan selain DAK namanya dana perbantuan, dimana dana disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Tapi setelah adanya DAK, daerah berlomba-lomba memasukkan proposal sehingga kebutuhan tidak tersalurkan secara merata, bahkan terkadang barang yang diterima tidak sesuai dengan yang didapatkan,” kata Dede di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/04) Maka dari itu, pihaknya memanggil BAPPENAS dan Kemenkeu untuk menanyakan mekanisme dan proses dalam memproses DAK. Sebab sistem yang dilakukan ini dinilainya tidak sejalan dengan roadmap Kementerian Kesehatan.

"Kita mau tahu ini mekanismenya

bagaimana. Apalagi ditambah dengan maraknya peserta BPJS, kita tidak mau DAK ini dipakai misalnya untuk terus-menerus membangun rumah sakit tetapi SDMnya tidak ada atau alatnya kurang. Makanya ini kan harus dibicarakan dulu, biar seirama dengan roadmap Kemenkes," jelas Dede.

Menurut Dede, DAK ini harus jelas. Oleh karena itu, kata politisi Demokrat ini, kita harus menentukan skala prioritas apa untuk mengejar Indonesia sehat. "Skala prioritas mana dulu untuk menjadikan Indonesia sehat, apakah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), rumah sakit, penyebaran SDM atau obat-obatan, ini kan saling terkait. Jadi bukan sekedar bagi-bagi uang ke daerah," ungkapnya. ■

(mm/sci/foto:azka/hr



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy

DPR RI Pertanyakan Pola Penyelidikan Kasus Peredaran Narkoba di Kepri

Anggota Komisi III DPR RI Dwi Ria Latifa mempertanyakan pola pengawasan, pola penyelidikan dan penyidikan sampai di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) mengenai peredaran narkoba dan pengawasan orang asing di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dasalnya berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa lapas sudah over kapasitas, bahkan dalam dua bulan terakhir naik sekitar 20 ribu lebih. Dan over kapasitas dalam setiap lapas ini adalah karena kasus narkoba.

"Oleh karena itu dalam pertemuan ini kami ingin mendapatkan informasi mengenai pola pengawasan, pola penyelidikan dan penyidikan sampai didalam lapas itu sendiri khusus mengenai peredaran narkoba dan pengawasan orang asing di Kepulauan Riau," tanya Dwi Ria Latifa saat pertemuan Tim Komisi III DPR RI dengan Kapolda, Kepala BNN dan Kakanwil Kumham Provinsi Riau di Kantor Polda Kepri, Batam, Kamis (13/4)

"Jadi, apakah memang pola rehabilitasi, pola penghukuman pada para pemakai yang mungkin sifatnya lebih bisa direhabilitasi apakah di sini diterapkan dan apakah penerapan itu kemudian berdampak positif kemudian lapas menjadi tidak over kapasitas," tambah anggota dewan dari dapil Kepri ini.

Dalam pertemuan tim Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa tersebut, ia mengharapkan ketiga institusi ini, yaitu Kepolisian, BNN dan Kementerian Hukum dan HAM untuk saling bersinergi dan pola pengawasan yang dilakukan tidak bersifat normatif.

"Karena ini memang satu sinergi bagian



<https://www.jelasberita.com>



Anggota Komisi III DPR RI Dwi Ria Latifa

dari institusi yang menangani peredaran narkoba bahkan penanganan kasus-kasus kejahatan yang melibatkan mereka yang melakukan tindak pidana sampai masuk penanganan di dalam lapas," papar politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut, ia menginformasikan bahwa pembentukan lapas rehabilitasi bagi kasus narkoba sedang dikaji. "Kalau rehabilitasi

didalam lapas, informasi dari Pak Budi Wasesa (Kepala BNN) itu bukan rehabilitasi," imbuhnya.

Yang terjadi didalam lapas itu justru lebih mendalam, lanjut Dwi Ria Latifa. "Yang tadinya tidak terkontaminasi jadi terkontaminasi karena saking padatnya kapasitas lapas," tandasnya.

Bayangkan, katanya, dalam satu kamar yang harusnya dihuni sekitar 5 orang diisi oleh puluhan orang, bahkan tidurpun harus berdiri.

Menurutnya, over kapasitas itu juga membuat peredaran didalam lapas cukup tinggi. Karena para bandarnya bisa dengan leluasa menggunakan Handphone untuk menawarkan dengan berbagai modus memasarkan narkoba ke dalam lapas.

"Ini yang menurut saya harus menjadi perhatian serius didalam sistem penanganan secara komprehensif dan sistem bagaimana pola penyelesaian kasus-kasus ini ditahap penyelidikan sampai tahap penyidikan sehingga keputusan yang dibuat hakim itu apakah ini direhab, apakah ini masuk dalam lapas yang malah menjadi *boomerang* yang menjadikan semakin banyak pecandu narkoba," tandasnya. ■

(es)/fotosuci/hr.

Saldi Isra Diminta Jaga Netralitas dan Independensi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengapresiasi penunjukan Prof Saldi Isra sebagai Hakim Konstitusi (Hakim MK-red) oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut diungkapkannya usai mengikuti sidang Paripurna DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (11/04).

"Saya memberi apresiasi terhadap Presiden Jokowi yang telah menunjuk Prof Saldi Isra untuk menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dari unsur pemerintah," ujar Benny.

Selama ini, Benny menilai Saldi dikenal dekat dengan lingkaran istana. Oleh karena itu ia meminta Saldi untuk menjaga netralitas dan tetap menjaga independensi dalam mengawal konstitusi.

Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psicotropika. Jika pemerintah masih lamban dalam menyiapkan Naskah Akademik, maka DPR RI melalui Baleg akan segera mengambil alih inisiasi revisi UU ini.

“ Revisi UU Narkotika sudah hampir 2 tahun, ini menunjukkan ketidak-seriusan pemerintah,” ungkap Firman saat RDPU dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/04).

Lebih lanjut, politisi dari F-Golkar ini mengatakan sejak awal pemerintah dinilai sangat lamban dalam merevisi UU Narkotika. Menurut dia, di awal tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia darurat narkoba. Namun, dalam prolegnas 2016 revisi UU Narkotika tidak masuk dalam daftar RUU prioritas pemerintah. Bahkan hingga saat ini, naskah akademik RUU Narkotika belum



Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo bersama Ketua Umum GRANAT

dipersiapkan.

"Oleh karena itu dalam rapat hari ini kita sepakati bilamana nanti pemerintah tidak siap, maka DPR RI akan siap mengambil

alih inisiatif bersama dengan GRANAT dan lintas sektor terkait lainnya karena ini revisi terbatas, jadi estimasi 2-3 bulan bisa kita selesaikan," paparnya.

Selanjutnya, sambung Firman, Baleg akan mengundang pemerintah untuk menanyakan sikap akhirnya. Jikalau pun, pemerintah bersikukuh untuk mempertahankan revisi UU Narkotika menjadi inisiatif pemerintah, maka Baleg tetap akan minta batasan waktu pembahasannya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum GRANAT Henry Yosodiningrat mempertanyakan semangat pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Keberadaan BNN sudah hampir 2 dasawarsa, namun kejahatan narkotik tidak menurun. Sebaliknya, jumlah korban semakin meningkat.

Disebutkan Henry, yang juga selaku anggota Komisi II DPR RI, saat ini angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba setidaknya 50 orang setiap hari dan jumlah pengguna maupun pecandu mencapai 6 juta orang. ■

(ann/so)/foto:rtzka/hr.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman

"Tugas utama hakim konsitusi itu menjaga konstitusi, bukan membuat undang-undang. Oleh karena itu kehadiran Saldi sebagai hakim MK yang haru diharapkan dapat meluruskan kembali Mahkamah Konstitusi yang selama ini menurut pengamatan kami telah berjalan di atas rel yang salah. Oleh karena itu saya meminta Saldi meluruskan kembali tegaknya konstitusi," papar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Ditambahkannya, selama ini Saldi belum terbukti rekam jejaknya. Pasalnya menurut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, selama ini berada di luar sebuah system. Seseorang baru akan terlihat rekam jejaknya jika sudah masuk dalam sebuah system. Tepatnya ketika dia tidak terabsorbisi dan tetap menjaga netralitasnya.

"Tidak ada jaminan seorang akademisi masuk dalam sebuah system dia akan baik juga. Karena kebanyakan orang yang sudah masuk dalam sebuah system bukannya memperbaiki system, malah ikut merusak system itu sendiri. Semua orang hebat kalau sudah masuk dalam sistem jadi malah ikut merusak system itu sendiri," pungkasnya

Saldi mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/4) melalui surat keputusan presiden no. 40p Tahun 2017 tentang pengangkatan Hakim MK. Pengucapan sumpah ikut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla serta beberapa pejabat Negara lainnya. ■

(Ayo). Foto: Rumi/hr.

Parlemen Modern Jadi Visi DPR RI Lima Tahun Mendatang

Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang Modern, Berwibawa, dan Kredibel menjadi visi dalam Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2015-2019. Visi ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi umum yang meliputi pelaksanaan fungsi DPR RI Periode 2009-2014, dan profil DPR RI Periode 2014-2019, serta setelah melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

“ Visi itu akan dicapai melalui dua misi. Pertama, dengan menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat,” jelas Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hasrul Azwar saat menyampaikan sambutan pada sosialisasi Renstra DPR RI tahun 2015-2019, di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (13/4).

Misi kedua, tambah politisi F-PPP itu, dengan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah (check and balances) dalam konteks pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Hasrul memaparkan, untuk menjaga semangat pelaksanaan Renstra DPR RI Tahun 2015-2019, DPR RI juga menginternalisasikan enam nilai dasar yaitu representasi, transparansi, aksesibilitas, akuntabilitas, efektivitas, dan permusyawaratan.

Secara rinci, masih kata Hasrul, DPR RI juga menetapkan sasaran strategis dan arah kebijakan sebagai penyelaras kerja bagi semua pemangku kepentingan di lingkungan kerja DPR RI dalam pencapaian sasaran.

"Sasaran strategis dan arah kebijakan ini menjadi tanggung jawab seluruh AKD dan unit kerja sistem pendukung DPR RI sesuai dengan perkembangan organisasi DPR RI terkini," imbuhnya.

Selain itu, Renstra ini juga menetapkan target kinerja yang harus dicapai. Namun target kinerja tersebut tidak diukur berdasarkan hasil yang dicapai, akan tetapi lebih kepada proses yang dilakukan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa DPR RI merupakan lembaga negara yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga lain.

"Namun demikian, seluruh tolok ukur capaian target kinerja yang bersifat kuantitatif



Anggota BURT DPR RI saat sosialisasi Renstra Ke Sulse

telah dimuat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI yang merupakan turunan dari Renstra DPR RI," kata Dapil Sumatera Utara I itu.

Hasrul pun berharap, dengan adanya sosialisasi ini, dapat memberikan pemahaman yang obyektif terkait upaya DPR RI dalam memperkuat kelembagaannya melalui sebuah dokumen perencanaan yang terarah dan berkesinambungan sehingga kinerja lembaga DPR RI dapat terus meningkat.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Pimpinan BURT lainnya, yakni Ketua BURT Roem Kono (F-PG/Dapil. Gorontalo), Wakil Ketua BURT Elva Hartati (F-PDI Perjuangan/Dapil Bengkulu), Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti (F-Gerindra/Dapil Jawa Tengah VIII), dan Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso (F-PD/Dapil Jawa Barat I).

Selain itu, hadir juga Anggota BURT, diantaranya dari F-PDI Perjuangan ada Ribka Tjiptaning P (Dapil Jawa Barat IV) dan Indah

Kurnia (Dapil Jawa Timur I). Selanjutnya Andi Fauziah P. Hatta (F-PG/Dapil Sulawesi Selatan III), dan Rita Zahara (F-Gerindra/Dapil Riau I).

Kemudian, hadir Venny Devianti (F-PG/Dapil Jawa Barat IX), Anton Sukartono Suratno (F-PD/Dapil Jawa Barat V), Bakri (F-PAN/Dapil Jambi), Refrizal (F-PPS/Dapil Sumatera Barat II), Syaiful Bahri (F-PKB/Dapil Jawa Timur IV), dan Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem/Dapil Sumatera Selatan II).

Tim BURT DPR RI diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Joko Imam Sentosa, para Kepala Daerah Tingkat II di Wilayah Sumsel, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Hadir juga menjadi narasumber, yakni Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palembang Prof. DR. Indawan Syahri, M.Pd dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, DR. Febrian, SH., MS. ■

(s.rmp) foto: sofyan/hr.



Pembangunan Pabrik Semen Harus Mensejahterakan Masyarakat

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau langsung alih fungsi lahan yang dimanfaatkan oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo ini ingin mengetahui secara langsung kondisi di lapangan serta pendapat masyarakat menanggapi pembangunan dan keberlangsungan pabrik semen di daerah tersebut, yang ramai diperbincangkan.

Pembangunan pabrik semen di Rembang oleh PT Semen Indonesia telah menjadi isu nasional, hal tersebut disebabkan karena adanya penolakan disertai unjuk rasa oleh beberapa orang yang tidak setuju dengan keberadaan pabrik. Merespon masalah tersebut Komisi IV DPR RI berkunjung untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di pabrik dan aspirasi masyarakat sekitar.

"Kami dalam posisi akan melihat secara jelas apa yang dialami di sini. Apa yang kita tangkap adalah pembangunan dalam arti untuk kepentingan masyarakat. Kami di DPR RI akan meninjau ini dari sisi aturan. Kita semua di sini akan menjalani ini tanpa terbang pilih, tanpa berpihak ke mana," papar Edhy saat rapat di kantor operasional pabrik semen, Rembang, Kamis (13/04).

Dalam rapat ini juga hadir Bupati Rembang Abdul Hafidz, Direkur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, Perwakilan Kementerian Hidup dan Kehutanan. Edhy yang memimpin rapat menegaskan Komisi IV

DPR RI, setelah mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan akan membuat keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia memaparkan spirit pembangunan infrastruktur negara harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh dua Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dan Viva Yoga Mauladi, serta dari lima orang Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, dari F PDI Perjuangan Sudin, F Golkar Ichsan Firdaus, F Gerindra Darori Wonodipuro, F PKB Acep Adang Ruhiyat, dan dari F Hanura Lalu Gede Syamsul Mujahid.

Setelah dilihat secara langsung, mayoritas warga Rembang telah mendukung keberadaan pabrik semen, Edhy pun sudah menanyakan beberapa unsur tokoh masyarakat dari kepala desa, camat dan warga biasa. Menurutnya meski ada beberapa yang menolak, tetap tidak bisa diabaikan, peran pemerintah harus hadir untuk warga negaranya meski itu hanya minoritas.

"Pembangunan manakala ada satu orang pun yang menolak, perlu didalami dan cari tahu apa masalahnya," ungkap Edhy.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan, warga sekitar yang melakukan penolakan keberadaan pabrik semen hanya lima persen. Namun dia berpendapat meskipun hanya segelintir, keberlangsungan pembangunan pabrik guna mendukung infrastruktur nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar tidak akan diabaikan.

Selain itu pemberian izin juga bukan karena besar kecilnya yang pro atau yang kontra pada keberadaan pabrik, tapi lebih disebabkan atas dasar kajian dalam semua aspek baik sosial dan lingkungan. Setelah ditinjau secara langsung ternyata wilayah yang dibangun pabrik bukanlah lahan pertanian palawija, tapi hutan pohon jati.

Kedatangan Tim Kunspek Komisi IV DPR RI disambut oleh kerumunan warga sekitar yang menunjukkan poster dukungan untuk pendirian pabrik semen, diramainya juga dengan teriakan yel-yel. ■

(eko.mp/foto:eko/hr)



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

Michael Wattimena Gembira Garuda Indonesia Buka Penerbangan ke Kaimana

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena, sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, menyambut dengan gembira dan bersukacita dimana pada tanggal 12 April Garuda Indonesia melakukan penerbangan perdana menuju ke Kaimana.

Michael Wattimena mengatakan Kaimana sendiri sebenarnya mempunyai potensi yang dahsyat, yaitu memiliki potensi wisata dan minyak. Dia melihat ini adalah pertanda yang baik dimana sudah terjadi beberapa penerbangan ke sana, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses penerbangan untuk tujuan daerah lain seperti Ambon dan Jakarta.

"Ini kita *support* dan Kaimana sendiri sudah dikenal cukup lama melalui lagunya Senja di Kaimana. Harapan kita, dengan adanya penerbangan ini memacu roda perekonomian yang ada di Kaimana, sehingga terjadi perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi di sana," katanya, saat menghadiri peresmian Penerbangan Perdana Garuda Indonesia Rute Kaimana, Manokwari dan Nabire, di Bandara Pattimura, Ambon, Rabu (12/04).

Menurutnya, Garuda Indonesia sebagai perusahaan BUMN bisa menjadi *feeder* terhadap Pelabuhan Udara untuk pulau-pulau yang ada di Papua Barat maupun juga bagi wilayah Indonesia Timur lainnya seperti Maluku.

"Ini pertanda positif dan kita mendukung seterusnya bukan saja ke Kaimana, tetapi dalam waktu dekat juga ada pembukaan di daerah-daerah yang sampai saat ini belum terjamah penerbangan," tegasnya.

Vice Direktur Garuda Indonesia *Region* Kalimantan, Sulawesi dan Papua Sentot Mujiono mengutarakan Kaimana merupakan salah satu daerah potensi di Papua Barat, potensi itu yang harus kita *ekpose*.

"Posisi Garuda Indonesia sebagai BUMN yang konsen menjembatani perkembangan ekonomi di daerah, oleh karena ini kita lihat potensi itu kita buka kesana. Hal ini sesuai dengan program Garuda Indonesia di tahun 2017 dan tahun 2018, wilayah timur akan kita kembangkan," katanya.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena menghadiri peresmian Penerbangan Perdana Garuda Indonesia Rute Kaimana, Manokwari dan Nabire, di Bandara Pattimura, Ambon.

Garuda Indonesia menargetkan penerbangan ini akan terisi 75%, tentunya dengan dukungan semua pihak baik dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pebisnis. "Saya yakin rute ini akan mencapai target yang kita rencanakan," ujarnya. ■

(es.mp)/foto:agung/hr.

Kepemilikan Asing Maksimal 49 Persen dalam Perusahaan Asuransi

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat mengikuti rapat kerja dengan Menkeu, menegaskan, yang paling ideal komposisi maksimal kepemilikan saham dalam perusahaan asuransi adalah 51% nasional dan 49% asing. Kritik atas usulan Pemerintah itu disampaikan agar asing tak menguasai kedaulatan nasional.

Lawan Keputusan Subyektif dan Diskriminatif Resolusi Parlemen Eropa Tentang Sawit

Keluarnya Resolusi Parlemen Eropa yang berkaitan dengan Palm Oil and Deforestation of Rainforests beberapa waktu yang lalu, mendorong Komisi IV untuk menyatakan sikapnya. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa hal ini menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk DPR untuk memberikan tanggapan secara formal.

“ Kita akan membuat jawaban atas resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa tersebut. Ini merupakan peringatan bagi kita, namun bila ini adalah keputusan yang bersifat subyektif dan diskriminatif, maka tentu kita harus melawan,” tandas Herman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/04).

Herman menyampaikan, dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, membahas mengenai sawit, penghentian secara bertahap penggunaan minyak nabati yang dianggap mendorong deforestasi. Resolusi itu juga berisi



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah diantaranya deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM.

"Saya kira semuanya merupakan tuduhan sepihak yang harus di *counter* atas dasar kewibawaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun laporan mengenai sawit tidak bersifat mengikat (non binding), Komisi IV DPR RI menilai laporan mengenai industri kelapa sawit Indonesia ini bertentangan dengan prinsip berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan azas penyelenggaraan perkebunan," tegasnya.

Menurutnya, Resolusi itu juga dapat membawa konsekuensi negatif serta kontra produktif terhadap industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan.

"Indonesia sudah berupaya sekuat tenaga dan berkontribusi untuk menurunkan gas karbon sampai dengan 29 persen," pungkasnya. ■

(dep/so) Foto : Andri/hr

Saya masih ingat saat awal pembahasan UU PPKSK, Komisi XI DPR RI telah mengingatkan pemerintah tentang batasan kepemilikan asing. Tapi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat itu menanggapi dengan mengatakan bahwa kepemilikan saham asing tidak perlu ditakutkan, karena bukanlah faktor utama untuk mengukur kinerja industri asuransi dalam negeri," ungkap Heri.

Menkeu sendiri di hadapan Komisi XI DPR RI menjelaskan, batasan 80% kepemilikan asing itu digunakan sebagai komitmen Indonesia atas beberapa perjanjian internasional. Politisi muda Gerindra ini mempertanyakan kebijakan Menkeu yang tetap ingin menempatkan asing dalam kepemilikan saham perusahaan asuransi di dalam negeri.

Dengan memberi batasan 80% bagi asing, sama saja seperti menyerahkan negara ini pada penguasaan asing.

"Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 240 juta jiwa, sebuah pasar yang sangat potensial. Sejauh mana aturan pembatasan kepemilikan asing terhadap perusahaan asuransi ini mampu menginjeksi perusahaan asuransi lokal untuk dapat bersaing dengan perusahaan asuransi asing. Seharusnya negara ada, hadir, dan berpihak kepada NKRI," tambah Heri. ■



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

Komisi III DPR RI Wacanakan Hak Angket Terhadap KPK

Komisi III DPR RI mewacanakan pengguliran hak angket DPR RI terhadap mitra kerjanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait dengan permintaan Komisi III DPR RI membuka rekaman pemeriksaan tersangka kasus E-KTP yang juga mantan Anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani yang mengaku mendapat tekanan dari sejumlah Anggota Komisi III DPR RI.

“ Setiap kesaksian pasti direkam. Apakah pernyataan Miryam yang menyebut nama kami terekam? Kalau ada kami minta. Karena ini juga jadi bahan kami untuk melakukan tindakan hukum bagi yang menyebut nama kami. Tapi kalau tidak ada dalam rekaman, maka ini bisa dikatakan mengada-ada,” kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK, di ruang rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Selasa (18/04) malam.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi III, Desmond J. Mahesa, bukti rekaman KPK akan mempertegas bahwa pernyataan tersebut benar diungkapkan Miryam. Namun jika rekaman tersebut tidak ada maka tuduhan tersebut bukan merupakan alat bukti dan menjadi bagian dari pembusukan institusi DPR RI.

“Hak angket lebih tinggi dari hak tanya. Kami pakai instrumen paksa supaya KPK membuka itu,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman yang memimpin rapat saat itu.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menolak membuka rekaman kesaksian Miryam. Setelah berkonsultasi

dengan jaksa KPK, keterangan dalam dakwaan persidangan disebutkan telah dibuktikan melalui pernyataan lebih dari satu saksi. Kebenaran itu menurutnya dapat diuji di persidangan.

Menanggapi penolakan KPK tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menilai kurang bisa diterima. Pasalnya bagian yang diminta Komisi III untuk dibuka itu hanya berkaitan kesaksian penyidik KPK, Novel Baswedan di sidang. Sehingga alasan bahwa bagian tersebut “rahasia” menurut Arsul tidak tepat.

“Jadi tidak untuk membuka rekaman keterangan Miryam sewaktu di BAP secara keseluruhan,” ujar Arsul.

Sementara itu Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa hak angket memang melekat pada setiap Anggota Dewan. Namun pihaknya tidak bekerja sendiri. Anggota komisi yang merupakan kepanjangan tangan fraksi, ditugaskan dan bertanggungjawab pada masing-masing fraksi. Oleh karena itu pihaknya



Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo

akan melaporkan usulan hak angket tersebut kepada fraksi masing-masing. Hal itu semua berkaitan dengan kebijakan dan pertanggungjawaban partai.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK, enam dari 10 fraksi mendukung hak angket. Keenam fraksi yang menyatakan setuju digulirkan hak angket adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, NasDem, dan PPP. Sementara Hanura, PAN, dan PKS masih akan berkonsultasi ke pimpinan fraksi. ■

(Ayu) Foto: Antef/hr



Sekjen DPR RI Achmad Djuned menerima Tim Pansus LKPJ DPRD Kab Cianjur

Perlu Kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Terkait LKPJ Transisi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di masa transisi menjadi pembahasan utama Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned dengan Tim Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Cianjur. LKPJ transisi ini terjadi karena pergantian Bupati yang belum menyelesaikan masa jabatannya.



Dewan Dukung Revisi UU Pengawas Persaingan Usaha

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijaya menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) karena UU ini sudah tidak memadai lagi untuk mengantisipasi persaingan usaha kini dan mendatang. Karena itu UU itu harus direvisi dan disempurnakan sesuai dengan tantangan usaha global.

Demikian disampaikan Azam Asman Natawijaya dalam forum legislasi "Maslahat RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" bersama pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/04).

"Tantangan persaingan usaha saat ini sulit dijangkau dan bahkan makin canggih, maka UU ini harus segera disempurnakan. Baik untuk nasional, regional maupun menghadapi tantangan global. Komisi VI DPR RI sudah menyusun revisi tersebut, dan karenanya perlu masukan dari masyarakat termasuk para ekonomi, hukum, akademisi, pelaku usaha, dan lain-lain," ujar politisi Demokrat ini.

Menurut UU LPMPUTS ini tidak mengatur masalah persaingan usaha sampai ke hulu dan juga tidak mengatur proses usaha itu sendiri. Seperti kekayaan negara yang strategis yang harus dikuasai oleh negara itu tidak dijelaskan secara rinci dan detail. "Jadi, harus ada keputusan besar untuk payung hukum masalah hulu dan hilir usaha ini," tambahnya.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), kata Azam juga menjadi lembaga pendidikan yang baik bagi anggotanya, sehingga ke depan DPR RI mendorong agar KPPU menjadi lembaga negara yang profesional, kuat, dan independen. "Kita ingin KPPU menjadi lembaga yang kuat, profesional dan independen untuk mendukung LPMPUTS," pungkasnya.

Tapi, kata Noorsy, sejak era Soeharto sampai sekarang belum ada pemerintahan yang konsisten menjalankan Pasal 33, khususnya ayat (4) dimana "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Bahkan kata Noorsy, masalah hajat hidup orang banyak tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Anehnya, UU itu juga menyinggung masalah geopolitik. Padahal, untuk Indomie saja dari tepung gandum, terigu, olahan, distribusi dan *outlet* sudah dikuasai oleh satu perusahaan. "Ini pun disebut alami, sementara semua kebutuhannya tergantung pada Amerika Serikat dan Italia," ungkapnya. ■

(so)/fotomizka/hr.

“Aturan peralihan itu perlu disepakati. Khusus untuk dari Mei 2016 sampai 2017, apakah itu kegiatan Bupati lama. Itu harus disepakati dulu antara DPRD dengan pemerintah,” kata Djuned di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/04).

Hal senada diungkapkan Analisis Kebijakan Badan Keahlian Dewan, Fitriani. Ia mengatakan, ketika LKPJ Pemkab berada di masa transisi, perlu adanya kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD setelah adanya rekomendasi Pansus LKPJ itu sendiri. Kesepakatan itu berlandaskan sesuai dengan PP No 3 Tahun 2017, dan diambil atas rekomendasi Pansus LKPJ.

"Artinya bahwa Pansus sudah

bekerja, kemudian Pansus yang merekomendasikan harus ada kesepakatan dulu, sehingga yang dilaporkan LKPJ di 2016 itu hanya Mei 2016 hingga Desember 2016. LKPJ itu dilaporkan di 2017, dan paling terlambat itu dilaporkan 3 bulan setelah akhir masa jabatan," jelas Fitriani.

Sementara itu sebelumnya, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Cianjur, Usep Setiawan mengatakan, pihaknya berkonsultasi mengenai pokok-pokok pikiran yang nanti akan disampaikan oleh Pansus LKPJ berkenaan dengan pertanggungjawaban Bupati tahun 2016.

Usep menjelaskan, Bupati mengakhiri masa jabatan pada Mei 2016 sebelum masa jabatan berakhir, karena

hendak mengikuti pilkada serentak. Pihaknya ingin mengetahui bagaimana sisa masa jabatan dari Mei hingga Desember 2016.

"Isu LKPJ transisi itu karena ada perbedaan persepsi diantara Anggota DPRD, bagaimana kita menyamakan persepsi supaya tidak berbenturan peraturan perundang-undangannya," jelas Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur itu.

Politisi Partai Demokrat itu memastikan, masukan ini menjadi salah satu pokok-pokok pikiran pansus untuk merekomendasikan hasil Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Cianjur. ■

(sf/sc)/foto: iwan arianias/hr.

Pemindahan Ibukota Harus Rasional

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengatakan, tentang pemindahan Ibukota harus secara cermat melihat fakta-fakta yang ada, dan harus secara cermat memperhatikan dampak pertumbuhan dan perkembangan Ibukota.

“ Ini bukan soal perasaan, ini adalah soal rasional. Berbicara terkait Ibukota harus secara rasional, karena ini terkait dengan pintu terdepan negara yang kita cintai. Ibukota merupakan etalase paling depan, maka kita harus tempatkan etalase itu sebagai yang terbaik, karena itu adalah wajah negara kita,” ucap Johnny di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/04).

Ada aspek-aspek yang terkait dengan Undang-Undang, lanjutnya, Ibukota merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai syarat-syarat dan aturan secara khusus.

“Ibukota menjadi tempat tinggalnya para pejabat tinggi negara, Presiden dan semua lembaga negara, bahkan menjadi tempat bermukimnya pejabat-pejabat tinggi negara asing, Duta Besar dan konselor lain. Oleh karenanya harus di *treat* secara khusus dan penting,” tandasnya.

Johnny juga mengatakan, dalam memindahkan Ibukota ada satu *budget* yang harus disediakan untuk memenuhi itu, oleh karenanya harus dilihat dahulu bagaimana inefisiensi di Ibukota selama ini. Selama 10 tahun terakhir, inefisiensi Ibukota mencapai ribuan triliun, perbandingkan dengan



Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G Plate

memindahkan Ibukota.

“Kalau ternyata inefisiensinya ternyata jauh lebih besar daripada pemindahan Ibukota itu, maka rasional untuk dipindahkan. Fakta lainnya adalah masalah tata ruang Ibukota, dimana terjadi kelebihan jumlah penduduk. Tanpa ada tata ruang dan kebijakan-kebijakan *visioner* atau *outlook* nya bagus, maka Jakarta ini jalan kaki saja sudah macet,” ucapnya.

Terkecuali ada satu kebijakan bisa mengatur bagaimana penambahan penduduk dan ruang gerak penduduk, serta syarat-syarat kehidupan penduduk dan pelayanan

administrasi yang baik dilakukan dengan betul dan itu *high cost*, tambahna.

“Saat ini pemerintah mencari alternatif pemecahan masalah Ibukota, salah satu alternatifnya adalah dengan memindahkan Ibukota. Kalau dikalkulasi secara ekonomis dan perspektif jangka panjang, maka rasional untuk kita pindahkan Ibukota dan pelayanan pemerintahan,” tegasnya.

Namun kata politikus Nasdem itu, ada beberapa catatan, pemindahan Ibukota jangan mengganggu jalannya pemerintah dan pelayanan publik serta harus terencana dengan baik, memilih lokasi pemindahan dengan berbagai macam syarat. Dari Komisi XI DPR RI, biaya dengan jangka panjang operasional yang lebih efisien. “Jika kita pindahkan Ibukota, maka harus dipastikan bahwa pelayanan publik akan lebih baik dari Ibukota sebelumnya,” pesannya. ■

(dep.mpl)/foto:uni/hr





Komisi II DPR RI Tetapkan Status Quo Lahan PT Pertiwi Lestari di Karawang

Hasil pertemuan Tim Komisi II DPR RI bersama BPN, Kemenhut dan Perhutani, Wakil Bupati Karawang sepakat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pertiwi Lestari, sehingga ditetapkan status quo. Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI Sareh Wiyono dan anggota Tim Arteria Dahlan, Senin (17/04) di Karawang.

Dalam posisi itu, tegas Arteria, siapapun tak boleh merasa memiliki tanah, siapapun tak boleh menggunakan alat negara untuk mengusir rakyat dari lokasi itu. Tim Komisi II secara khusus mengunjungi lokasi dan menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait membahas persoalan sengketa tanah di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang terus berkepanjangan, dan mengakibatkan ratusan petani korban konflik lahan dengan PT. Pertiwi Lestari ini harus terusir dari tempat tinggalnya.

Kesimpulan berikutnya, lanjut Arteria, DPR RI memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk membuka akses jalan seluas - luasnya dengan membongkar

portal yang digunakan untuk menutup jalan oleh PT. Pertiwi Lestari. Selain itu membuka kembali fasilitas sosial dan umum baik pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat sekitar. Sedangkan rumah - rumah warga yang sudah dihancurkan harus diusahakan dibangun secara sosial dengan melibatkan Pemkab Karawang.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Pemkab Karawang untuk mendesak PT. PL mengembalikan apa yang sudah menjadi hak-hak Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Ditambahkan Arteria, penyelesaian kasus tanah yang berlarut-larut ini akan diusahakan dalam masa persidangan ke-IV DPR RI dengan memanggil semua pihak yakni

Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, Pemkab Karawang, bahkan Gubernur Jabar, Kapolda serta Pangdam untuk duduk bersama di DPR RI guna merumuskan solusi terbaik. Tidak hanya melulu hukum, sebab kalau soal hukum rakyat pasti kalah.

"Pada forum nanti Komisi II DPR RI minta bisa melibatkan semua pihak termasuk pemilih PT. PL Perusahaan ini sudah jelas melanggar hukum, melanggar nilai kemanusiaan sehingga kami minta aparat untuk mengusut tuntas . Perlu diusut kembali bagaimana lahirnya HGU diubah menjadi HGB. Rakyat sudah hadir jauh sebelum aparat kehutanan, sebelum Pemda maupun perusahaan-perusahaan di lokasi ini," kata Arteria menambahkan. ■

(mp)/foto:mastur/hr.



Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI Sareh Wiyono dan Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama istri meninjau pemungutan suara Pilkada DKI di RS Fatmawati Jakarta Selatan, Foto Jaka

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah membuka seminar nasional Mahkamah Kehormatan DPR RI bertema "Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan" di Crowne Hotel, Jakarta, Senin (17/04).
Foto: Andri



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu dini hari (19/04) Foto: Andri.